

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

BIRO PEMERINTAHAN, OTONOMI DAERAH DAN KERJASAMA



TAHUN 2025



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah dan Kerjasama Tahun 2025

Executive Summary

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah dan Kerjasama Tahun 2025 merupakan bentuk pertanggungjawaban kinerja atas pelaksanaan tugas dan fungsi dalam mendukung pencapaian tujuan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah. Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini menjadi bagian dari implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta instrumen pengendalian manajemen dalam memastikan keterkaitan antara perencanaan, pelaksanaan, pengukuran, dan evaluasi kinerja organisasi.

Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah dan Kerjasama menunjukkan kinerja yang **“Sangat Tinggi”**, dengan rata-rata capaian kinerja sebesar **103,94 persen**, yang mencerminkan efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan terhadap sasaran yang telah ditetapkan. Seluruh sasaran program berhasil dicapai, meliputi peningkatan kualitas pelaksanaan kerja sama daerah, peningkatan kualitas rekomendasi kebijakan pemerintahan umum, peningkatan kualitas pelaksanaan otonomi daerah, serta peningkatan kualitas pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah di lingkungan Biro dan Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat

Pencapaian tersebut didukung oleh keselarasan antara dokumen perencanaan dan pelaksanaan kinerja, penguatan koordinasi lintas perangkat daerah, serta peningkatan kualitas fasilitasi dan rekomendasi kebijakan yang berorientasi pada hasil. Selain itu, pengelolaan anggaran dilaksanakan secara efektif dan efisien, sehingga mendukung pencapaian *output* dan *outcome* kinerja tanpa mengurangi kualitas layanan yang diberikan.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah dan Kerjasama Tahun 2025 ini diharapkan tidak hanya menjadi dokumen pertanggungjawaban, tetapi juga menjadi dasar pengambilan keputusan strategis pimpinan dalam rangka peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan dan kinerja organisasi pada periode selanjutnya.

Daftar Isi

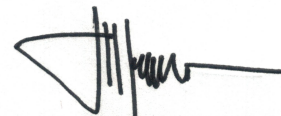
Ringkasan Eksekutif.....	1
Daftar Isi.....	2
Kata Pengantar.....	3
Bab I Pendahuluan.....	4
Latar Belakang.....	5
Isu-isu Strategis.....	6
Sumber Daya Manusia.....	8
Anggaran.....	10
Sistematika Penulisan.....	11
Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP tahun 2025.....	12
Langkah Perbaikan Internal OPD.....	12
Bab II Perencanaan Kinerja.....	14
Tujuan.....	15
Sasaran.....	15
Indikator Kinerja.....	15
Strategi dan Arah Kebijakan.....	17
Struktur Program dan Kegiatan.....	18
Perjanjian Kinerja.....	18
Instrumen Pendukung Capaian Kinerja.....	19
Bab III Akuntabilitas Kinerja.....	21
Capaian Kinerja Organisasi.....	22
Realisasi Anggaran.....	42
Inovasi.....	43
Bab IV Penutup.....	45
Kesimpulan.....	46
Rekomendasi.....	46
Lampiran	

Kata Pengantar

Laporan Kinerja Intansi Pemerintah Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah dan Kerjasama Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja. LKjIP disusun berdasarkan Rencana Kerja (Renja) Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 dan menggambarkan capaian target kinerja sebagaimana ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Kepala Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah dan Kerjasama Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025. Selanjutnya pencapaian target kinerja utama tersebut akan menggambarkan progress pencapaian kinerja dalam rangka mendukung pembangunan Jawa Tengah yang telah ditetapkan pada Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat Daerah Tahun 2024-2026.

Semarang, 04 Februari 2026

Kepala Biro Pemerintahan,
Otonomi Daerah dan Kerjasama



Yasip Khasan, S.IP., M.M.
Pembina Utama Muda
NIP. 197412191997031005



**NGOPENI.
NGLAKONI.**
Jateng

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2025

01

Pendahuluan

Latar Belakang

Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah dan Kerjasama merupakan salah satu unsur pendukung pelaksanaan tugas Gubernur dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Biro ini mempunyai tugas melaksanakan pengoordinasian penyusunan kebijakan Daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah, membantu pelaksanaan tugas dan wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat, serta pelayanan administratif dan pembinaan sumber daya Aparatur Sipil Negara (ASN) di bidang Pemerintahan, Otonomi Daerah dan Kerjasama. Pelaksanaan tugas tersebut menempatkan Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah dan Kerjasama pada posisi strategis dalam memastikan keterpaduan kebijakan, konsistensi pelaksanaan program, serta efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Dalam melaksanakan tugas dimaksud, Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah dan Kerjasama menyelenggarakan fungsi pengoordinasian penyusunan kebijakan Daerah di bidang Pemerintahan, Otonomi Daerah dan Kerjasama; pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang Pemerintahan, Otonomi Daerah dan Kerjasama; pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah di bidang Pemerintahan, Otonomi Daerah dan Kerjasama; pengoordinasian pelaksanaan tugas dan wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat bidang Pemerintahan, Otonomi Daerah dan Kerjasama; pelaksanaan fasilitasi sekretariat Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat; serta penyiapan pengelolaan ketatausahaan dan pelayanan administrasi serta pembinaan ASN di lingkungan Biro. Keseluruhan fungsi tersebut dilaksanakan secara terkoordinasi untuk mendukung tercapainya tujuan pembangunan daerah dan terselenggaranya pemerintahan yang efektif dan akuntabel.

Asas penyelenggaraan *good governance* yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, salah satunya asas akuntabilitas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Dalam konteks tersebut, setiap instansi pemerintah dituntut untuk menyusun dan menyampaikan laporan kinerja sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsinya.

Dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, bahwa setiap instansi sebagai unsur penyelenggara pemerintahan wajib untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsinya serta kewenangan pengelolaan sumber daya dengan didasarkan suatu perencanaan strategis yang ditetapkan oleh masing masing instansi. Pertanggungjawaban dimaksud berupa laporan kinerja yang disampaikan kepada atasan kepala instansi dan lembaga lembaga pengawasan. Laporan kinerja tersebut menggambarkan kinerja instansi pemerintah yang bersangkutan melalui Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Tujuan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yaitu memberikan informasi kinerja yang terstruktur kepada pemberi mandata atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai serta sebagai upaya berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya.

Laporan Kinerja Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah dan Kerjasama disusun sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi selama Tahun 2025 dalam rangka mencapai program yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategis Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024–2026 dan dokumen Perjanjian Kinerja Kepala Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah dan Kerjasama Tahun 2025 serta Rencana Kerja tahun 2025. Laporan Kinerja ini digunakan sebagai upaya perbaikan untuk peningkatan kinerja di lingkungan Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah dan Kerjasama serta menjadi bahan evaluasi dalam penyusunan perencanaan dan perbaikan kinerja Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah dan Kerjasama di tahun yang akan datang.

Isu-isu Strategis

Dalam melaksanakan pengoordinasian penyusunan kebijakan Daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah, membantu pelaksanaan tugas dan wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat, serta pelayanan administratif dan pembinaan sumber daya Aparatur Sipil Negara (ASN) di bidang Pemerintahan, Otonomi Daerah dan Kerjasama pada tahun 2025, terdapat aspek-aspek strategis yang perlu diperhatikan dengan mempertimbangkan profil yang

telah teridentifikasi pada Rencana Strategis Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024–2026 yaitu:

1 Belum Optimalnya kerjasama antar pemerintah, Lembaga, Badan Usaha dan Swasta

Hal ini disebabkan oleh belum efektifnya pelaksanaan kerja sama antar pemerintah, belum efektifnya pelaksanaan kerja sama dengan lembaga, badan usaha, dan swasta, serta belum optimalnya pemetaan potensi kerja sama dan evaluasi pelaksanaan kerja sama yang telah dilakukan. Kondisi tersebut berdampak pada belum terwujudnya sinergi yang kuat antar pemangku kepentingan dalam mendukung pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan, sehingga pemanfaatan sumber daya, peningkatan kualitas pelayanan publik, dan pencapaian sasaran pembangunan daerah belum dapat dicapai secara maksimal.

2 Kurang optimalnya administrasi dan pelaksanaan kebijakan pemerintahan daerah

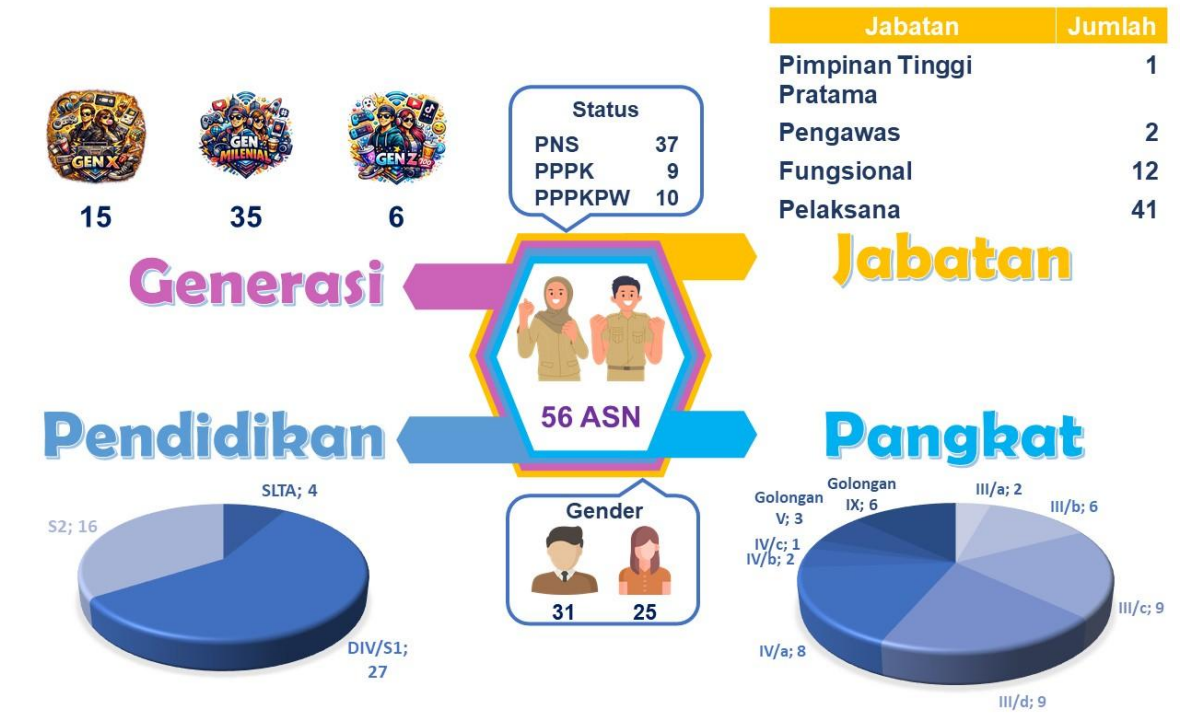
Disebabkan oleh belum optimalnya pengelolaan administrasi kebijakan pemerintahan, masih adanya kesenjangan pada wilayah perbatasan, serta masih tingginya kasus sengketa tanah pemerintah. Kondisi tersebut berdampak pada belum optimalnya implementasi kebijakan daerah, tertib administrasi pemerintahan, dan kepastian hukum, sehingga berpotensi menghambat kelancaran pelayanan publik, pemerataan pembangunan antarwilayah, serta pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah secara efektif dan berkelanjutan

3 Kurang maksimalnya pelaksanaan Otonomi Daerah sesuai peraturan perundang-undangan

Disebabkan oleh tingginya frekuensi permohonan layanan administrasi Kepala Daerah dan DPRD, belum optimalnya pengembangan otonomi daerah dan penataan urusan pemerintahan sesuai dengan kewenangan yang telah ditetapkan, serta belum efektifnya evaluasi terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah. Kondisi tersebut berdampak pada belum optimalnya pelaksanaan desentralisasi, serta kurang efektifnya penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan prinsip otonomi daerah yang diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan.

Sumber Daya Manusia

Terdapat beberapa faktor yang berpengaruh terhadap keberhasilan pelaksanaan tugas-tugas dan peran Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah dan Kerjasama dalam menghadapi dinamika perubahan lingkungan strategis, diantaranya keberadaan sumber daya manusia (SDM). Dengan SDM yang kompeten, professional, berpendidikan tinggi, Sekretariat Daerah diharapkan dapat melaksanakan tugas-tugas lembaga dan unit kerja dengan lebih baik.



Komposisi Sumber Daya Manusia pada Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah dan Kerjasama berjumlah 56 (lima puluh enam) ASN yang terdiri atas 37 (tiga puluh tujuh) PNS, 9 (sembilan) PPPK, dan 10 (sepuluh) PPPK Paruh Waktu (PPPK PW). Berdasarkan komposisi jabatan, terdapat 1 (satu) Jabatan Pimpinian Tinggi Pratama, 2 (dua) jabatan Pengawas, 12 (dua belas) jabatan Fungsional, dan 41 (empat puluh satu) jabatan Pelaksana, yang menunjukkan struktur organisasi didominasi oleh jabatan pelaksana sebagai unsur operasional dalam mendukung pelaksanaan program dan kegiatan. Dari aspek komposisi generasi, ASN didominasi oleh Generasi Milenial sebanyak 35 (tiga puluh lima) orang, diikuti Generasi X sebanyak 15 (lima belas) orang, dan Generasi Z sebanyak 6 (enam) orang, yang mencerminkan potensi adaptivitas dan kesiapan terhadap transformasi digital serta dinamika tata kelola pemerintahan.

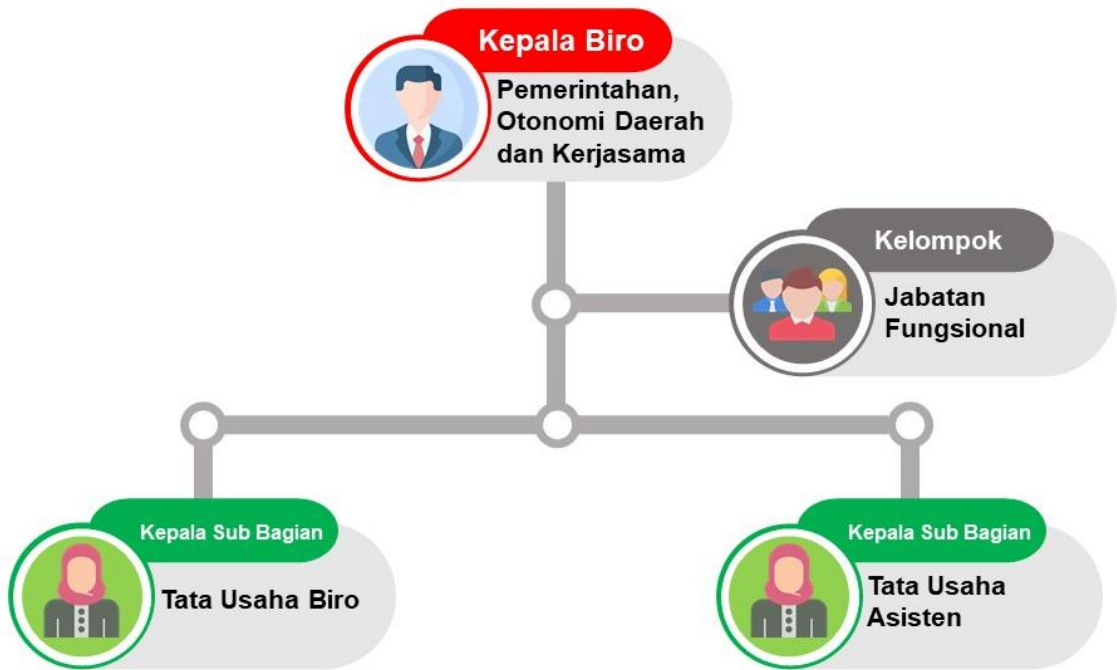
Dari sisi tingkat pendidikan, sebagian besar ASN telah memiliki kualifikasi pendidikan tinggi, yaitu 27 (dua puluh tujuh) orang berpendidikan DIV/S1, 16 (enam belas) orang S2, dan 4 (empat) orang SLTA, yang menunjukkan kapasitas akademik

yang memadai dalam mendukung pelaksanaan tugas pemerintahan, otonomi daerah, dan kerja sama. Sementara itu, berdasarkan golongan kepangkatan, ASN tersebar pada berbagai jenjang, dengan dominasi pada Golongan III/c dan III/d masing-masing sebanyak 9 (sembilan) orang, disusul IV/a sebanyak 8 (delapan) orang, III/b dan Golongan IX masing-masing 6 (enam) orang, Golongan V sebanyak 3 (tiga) orang, III/a sebanyak 2 (dua) orang, serta IV/b dan IV/c masing-masing 1 (satu) orang. Komposisi tersebut menunjukkan keseimbangan antara pengalaman, jenjang karier, dan kompetensi struktural maupun fungsional yang mendukung pencapaian kinerja organisasi secara optimal.

Struktur Organisasi Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah dan Kerjasama dibentuk berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2026 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Inspektorat dan Pembentukan Staf Ahli Gubernur. Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah dan Kerjasama tahun 2025 dipimpin oleh:

- 1 Kepala Biro : Yasip Khasani, S.IP., M.M.
- 2 Kepala Sub Bagian Tata Usaha Biro : Vivin Indah Rosalyn, SE, MM
- 3 Kepala Sub Bagian Tata Usaha Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat : Sri Handayani, SH, MM
- 4 Pejabat Fungsional

Adapun struktur organisasi digambarkan sebagai berikut:

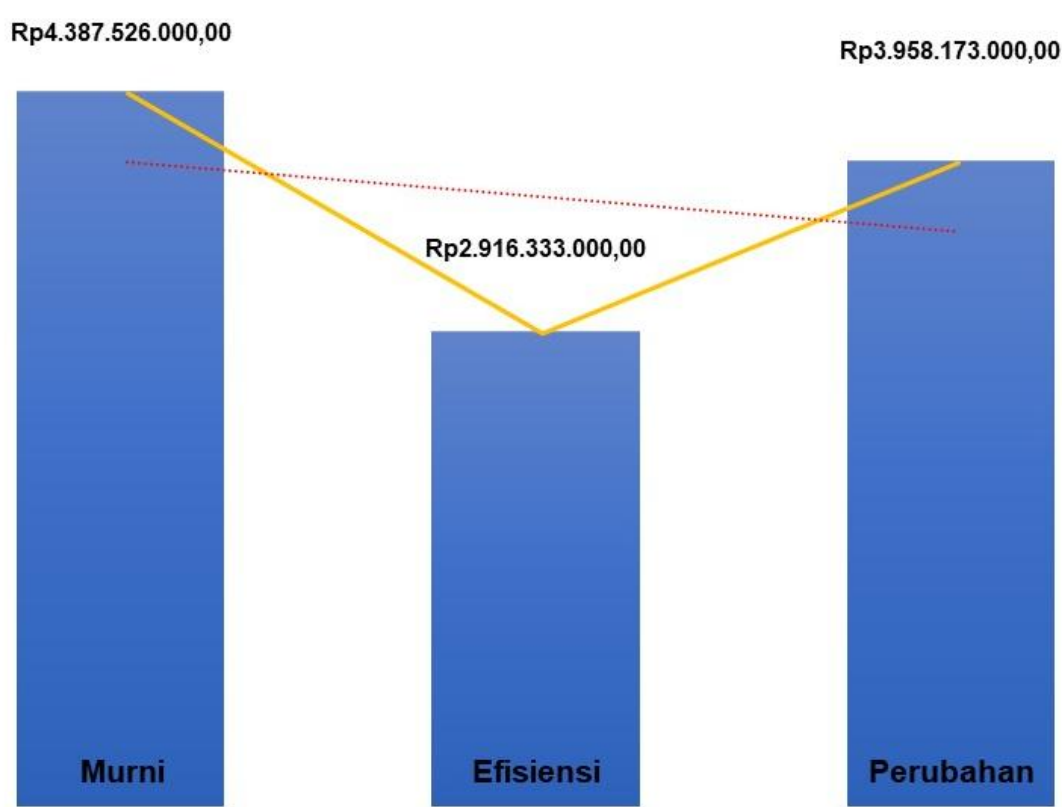


Dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi sebagai Penunjang Urusan Pemerintahan bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia ASN, selain didukung dengan Sumber Daya Manusia yang berkompeten dibidangnya, Biro

Pemerintahan, Otonomi Daerah dan Kerjasama juga didukung dengan adanya fasilitas sarana dan prasarana yang memadai. Pengelolaan dan tanggung jawab terhadap sarana dan prasarana tersebut oleh Biro Umum.

Anggaran

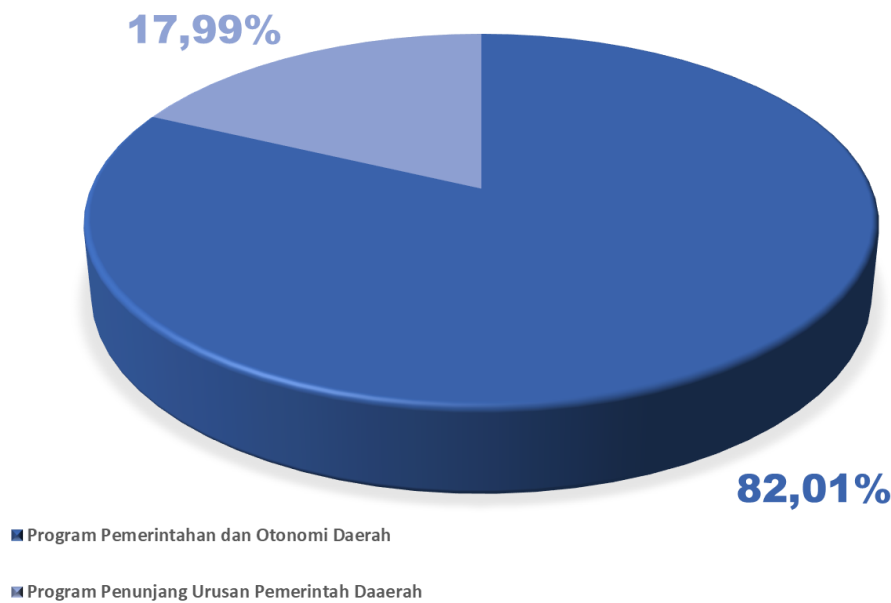
Anggaran belanja Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah dan Kerjasama tahun 2025 sebesar Rp. 4.387.526.000,00 bersumber Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) efisiensi Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah dan Kerjasama menjadi Rp. 2.916.333.000,00 (turun Rp. 1.471.193.000 atau 33,53 persen dari DPA Murni). Selanjutnya pada DPA Perubahan alokasi anggaran Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah dan Kerjasama menjadi Rp. 3.958.173.000,00 (turun Rp. 429.353.000 atau 9,79 persen dari DPA Murni)



Untuk mendukung pencapaian kinerja pada tahun 2025, Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah dan Kerjasama didukung oleh 2 (dua) program yaitu:

- 1 Program Pemerintahan dan Otonomi Daerah sejumlah Rp.3.246.217.000,00 (82,01 persen);dan

- 2
- Program Penunjang Urusan Pemerintah Daaerah Provinsi sejumlah Rp.711.956.000,00 (17,99 persen).



Sistematika Penulisan

Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah dan Kerjasama Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah tahun 2024 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (*strategic issued*) yang sedang dihadapi organisasi.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Capaian Kinerja Organisasi

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis Organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut:

- 1
- Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
- 2
- Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;

- 3 Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;
- 4 Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada);
- 5 Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan;
- 6 Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;
- 7 Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja).

Realisasi Anggaran

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

BAB IV PENUTUP

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

LAMPIRAN

- 1 Perjanjian Kinerja
- 2 Lain-lain yang dianggap perlu.

Tindak Lanjut atas LHE SAKIP Tahun 2025

No	Saran/Rekomendasi	Tindak Lanjut
1	Optimalisasi evaluasi akuntabilitas kinerja dengan memperhatikan keselarasan capaian kinerja pada dokumen perjanjian kinerja (PK), Indikator Kinerja Individu (IKI) dengan aplikasi e-controlling kinerja	Penguatan evaluasi akuntabilitas kinerja dengan memastikan keselarasan antara capaian kinerja pada dokumen Perjanjian Kinerja (PK), Indikator Kinerja Individu (IKI) dengan aplikasi e-controlling kinerja

Langkah Perbaikan Internal OPD

Dalam peningkatan kinerja Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah dan Kerjasama pada tahun 2024, langkah perbaikan yang telah dilaksanakan antara lain:

No	Saran/Rekomendasi	Tindak Lanjut
1	Mengikuti pelatihan untuk meningkatkan pemahaman tentang regulasi otonomi daerah, manajemen pemerintahan, da kerja sama antar daerah	Mengikutsertakan pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan pemahaman tentang regulasi otonomi daerah, manajemen pemerintahan, da kerja sama antar daerah melalui instansi terkait.
2	Mengembangkan aplikasi berbasis web untuk mempermudah koordinasi, monitoring dan pelaporan program kerja	Tersedia aplikasi <i>Smart Office System</i> (Sistem Manajemen Administrasi Rapi dan Terkoneksi)
3	Mendorong pelaksanaan kerjasama yang inovatif antara kabupaten/kota di Jawa Tengah	Mendorong pelaksanaan kerjasama antara kabupaten/kota di Jawa Tengah melalui Rapat Koordinasi Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat se Jawa Tengah pada tanggal 5 Desember 2025.



**NGOPENI.
NGLAKONI.**
Jateng

**Laporan
Kinerja
Instansi
Pemerintah
Tahun 2025**

02

Perencanaan Kinerja

Tujuan

Guna menjawab permasalahan dan menangani isu-isu strategis yang dihadapi Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah, telah ditetapkan rumusan tujuan yang hendak dicapai dalam periode Tahun 2024–2026.

Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah menetapkan 2 (dua) tujuan, yaitu:

- 1 Meningkatkan kualitas kebijakan daerah
- 2 Meningkatkan kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Sekretariat Daerah

Sasaran

Guna mencapai hasil yang diharapkan dari Tujuan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah dimaksud, dirumuskan sasaran yang akan dicapai oleh Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024–2026. Pada tujuan pertama yaitu meningkatkan kualitas kebijakan daerah, ditetapkan satu sasaran, yakni meningkatnya sinergi kebijakan yang adaptif dan berorientasi hasil. Selanjutnya tujuan kedua, meningkatkan kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Sekretariat Daerah, ditetapkan dua sasaran yaitu meningkatnya kualitas pelayanan Perangkat Daerah; dan meningkatnya manajemen risiko Perangkat Daerah. Untuk mewujudkan sasaran tersebut, Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah pada dokumen Rencana Strategis Tahun 2024–2026 merumuskan sejumlah program yang disusun secara terarah dan terintegrasi sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan. Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah dan Kerjasama dalam mewujudkan sasaran meningkatnya sinergi kebijakan yang adaptif dan berorientasi hasil, ditetapkan program pemerintahan dan otonomi daerah.

Indikator Kinerja

Dalam pelaksanaan kegiatan Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah dan Kerjasama berpedoman pada Rencana Strategis Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah. Kinerja Program yang ada dalam Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah dan Kerjasama berkontribusi dalam mencapai target dan sasaran sekretariat daerah yaitu:

- 1 Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Kerjasama Daerah;
- 2 Meningkatnya Kualitas Rekomendasi Kebijakan Pemerintahan Umum;

- 3
- Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Otonomi Daerah;
- 4
- Meningkatnya kualitas pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah dan Kerjasama dan Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat

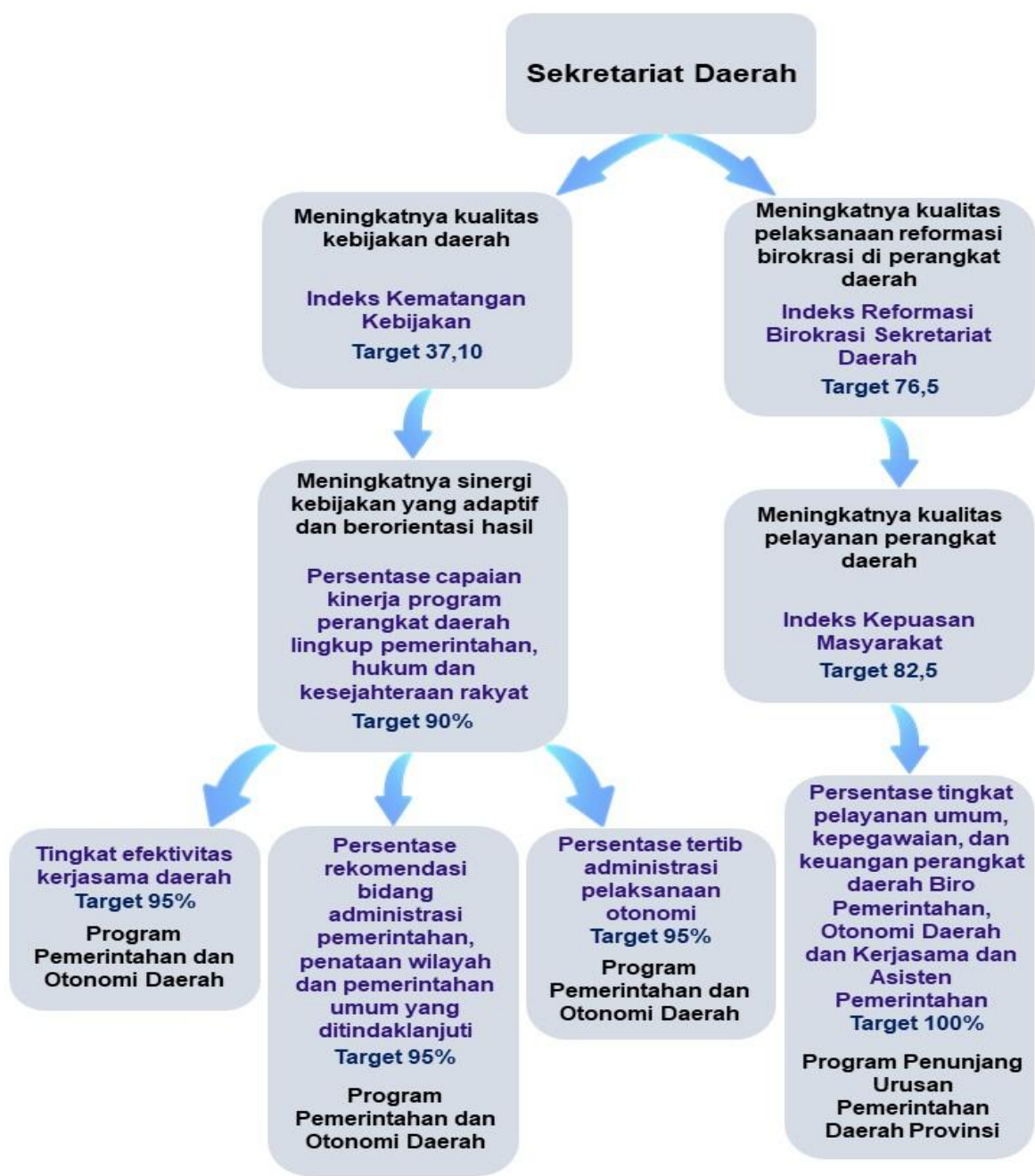
Adapun target kinerja Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah dan Kerjasama tahun 2024-2026 yaitu:

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target Kinerja		
			2024	2025	2026
1	Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Kerjasama Daerah	Tingkat efektivitas kerjasama daerah	95%	95%	95%
2	Meningkatnya Kualitas Rekomendasi Kebijakan Pemerintahan Umum	Persentase rekomendasi bidang administrasi pemerintahan, penataan wilayah dan pemerintahan umum yang ditindaklanjuti	95%	95%	95%
3	Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Otonomi Daerah	Persentase tertib administrasi pelaksanaan otonomi daerah	95%	95%	95%
4	Meningkatnya kualitas pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah dan Kerjasama dan Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Presentase tingkat pelayanan umum kepegawaian dan keuangan perangkat daerah Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah dan Kerjasama dan Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	100%	100%	100%
		Indeks Kepuasan Masyarakat Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah dan Kerjasama	82	82,5	83
		Indek Manajemen Risiko Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah dan Kerjasama	3	3	3

Berdasarkan target kinerja Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah dan Kerjasama Tahun 2024–2026, seluruh sasaran program diarahkan pada pencapaian kinerja yang konsisten dan berkelanjutan. Pada sasaran program meningkatnya kualitas pelaksanaan kerja sama daerah, indikator tingkat efektivitas kerja sama daerah ditetapkan sebesar 95% pada Tahun 2024-2026. Sasaran program meningkatnya kualitas rekomendasi kebijakan pemerintahan umum serta meningkatnya kualitas pelaksanaan otonomi daerah masing-masing ditetapkan dengan target stabil sebesar 95 persen selama periode 2024–2026. Sementara itu, sasaran program meningkatnya kualitas pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah ditargetkan sebesar 100 persen secara konsisten setiap tahun. Selain itu, indikator pendukung berupa Indeks Kepuasan Masyarakat ditargetkan meningkat dari 82 pada Tahun 2024 menjadi 82,5 pada Tahun 2025 dan 83 pada Tahun 2026, serta Indeks Manajemen Risiko ditetapkan stabil pada nilai 3 selama periode tersebut. Secara keseluruhan, target kinerja tersebut mencerminkan komitmen organisasi dalam menjaga konsistensi capaian, meningkatkan kualitas layanan, serta memperkuat tata kelola dan manajemen risiko secara berkelanjutan.

Startegi dan Arah Kebijakan

Cascading kinerja merupakan arsitektur kinerja yang akan memperlihatkan adanya keterkaitan kinerja Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah dan Kerjasama dengan kondisi yang ingin diwujudkan Sekretariat Daerah, sehingga kontribusi Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah dan Kerjasama terhadap pencapaian target kinerja Sekretariat Daerah dapat terlihat dengan jelas.



Struktur Program dan Kegiatan

Dalam rangka mencapai target kineja yang telah ditetapkan, Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah dan Kerjasama telah dilaksanakan 2 (dua) program, 4 (empat) kegiatan, 11 (sebelas) sub kegiatan dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah. Berdasarkan Rencana Kerja Perubahan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025, berikut program, kegiatan dan sub kegiatan tahun 2025:

No	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)
Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah dan Kerjasama		3.958.173.000
1	Program Pemerintahan dan Otonomi Daerah	3.246.217.000
1.1	Pelaksanaan Tugas Pemerintahan	698.403.000
1.1.1	Pengelolaan Administrasi Kebijakan Pemerintahan	431.051.000
1.1.2	Fasilitasi Pelaksanaan Pemerintahan Umum	143.071.000
1.1.3	Fasilitasi Penataan Wilayah	124.281.000
1.2	Pelaksanaan Otonomi Daerah	1.040.001.000
1.2.1	Fasilitasi Administrasi Kepala Daerah dan DPRD	464.007.000
1.2.2	Pengembangan Otonomi dan Penataan Urusan	139.228.000
1.2.3	Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan	436.766.000
1.3	Fasilitasi Kerjasama Daerah	1.507.813.000
1.3.1	Fasilitasi Kerjasama antar Pemerintah	1.131.875.000
1.3.2	Fasilitasi Kerjasama Badan Usaha/Swasta	142.746.000
1.3.3	Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	233.192.000
2	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	711.956.000
2.1	Administrasi Umum Perangkat Daerah	711.956.000
2.1.1	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	675.230.000
2.1.2	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	36.726.000

Perjanjian Kinerja

Perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (*outcome*) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup *outcome* yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, Kepala Biro Pemerintahan,

Otonomi Daerah dan Kerjasama pada tahun 2025 telah menyusun Perjanjian Kinerja dengan Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah untuk mewujudkan target kinerja sesuai lampiran perjanjian ini.

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1	Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Kerjasama Daerah	Tingkat efektivitas kerjasama daerah	%	95
2	Meningkatnya Kualitas Rekomendasi Kebijakan Pemerintahan Umum	Persentase rekomendasi bidang administrasi pemerintahan, penataan wilayah dan pemerintahan umum yang ditindaklanjuti	%	95
3	Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Otonomi Daerah	Persentase tertib administrasi pelaksanaan otonomi daerah	%	95
4	Meningkatnya kualitas pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah dan Kerjasama dan Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Presentase tingkat pelayanan umum kepegawaian dan keuangan perangkat daerah Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah dan Kerjasama dan Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	%	100
		Indeks Kepuasan Masyarakat Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah dan Kerjasama		82,5
		Indek Manajemen Risiko Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah dan Kerjasama		3

Instrumen Pendukung Capaian Kinerja

Aplikasi yang digunakan dalam mendukung kinerja Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah dan Kerjasama sebagai berikut *Single Sign On* Provinsi Jawa Tengah (SSO Pemerintah Provinsi Jawa Tengah), Sistem Informasi Kerjasama (SIKEJAM) dan Sistem pelayanan aDministrasi perjalanan IUar Negerl jAteng (SEDUNIA).

1 SSO Pemerintah Provinsi Jawa Tengah



2 SIKEJAM



3 SEDUNIA



Tentang SEDUNIA

SEDUNIA adalah Sistem pelayanan administrasi perjalanan Luar Negeri Jateng yang dikembangkan oleh Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah dan Kerjasama Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah untuk Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah. Masing-masing Kabupaten/Kota hanya diberikan 2 (dua) akun sebagai Pemohon.



**Laporan
Kinerja
Instansi
Pemerintah
Tahun 2025**

03

Akuntabilitas Kinerja

Capaian Kinerja Organisasi

Pengukuran capaian kinerja tahun 2025 adalah bagian dari penyelenggaraan akuntabilitas kinerja. Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah dan Kerjasama Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah, sebagai tindak lanjut pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP), setiap instansi pemerintah wajib menyusun Laporan Kinerja yang melaporkan progress kinerja atas mandat dan sumber daya yang digunakan.

Rumus yang digunakan untuk menghitung persentase pencapaian target indikator kinerja adalah semakin tinggi realisasi, capaian kinerjanya semakin baik dengan perhitungan:

$$Capaian = \frac{Realisasi}{Target} \times 100\%$$

Dalam rangka melakukan evaluasi keberhasilan atas pencapaian tujuan dan sasaran organisasi sebagaimana yang telah ditetapkan pada perencanaan jangka menengah, maka digunakan skala pengukuran sebagai berikut:

No	Skala Kinerja	Kategori
1	≥ 91%	Sangat Tinggi
2	76% - 90,99%	Tinggi
3	66% - 75,99%	Sedang
4	51% - 65,99%	Rendah
5	≤ 50,99%	Sangat Rendah

Hasil pelaksanaan program dan kegiatan Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah dan Kerjasama dalam rangka mendukung pencapaian sasaran yang telah ditetapkan. Capaian kinerja tersebut diukur melalui beberapa sasaran program, meliputi meningkatnya kualitas pelaksanaan kerja sama daerah yang diukur melalui tingkat efektivitas kerja sama daerah; meningkatnya kualitas rekomendasi kebijakan pemerintahan umum yang diukur melalui persentase rekomendasi bidang administrasi pemerintahan, penataan wilayah, dan pemerintahan umum yang ditindaklanjuti; meningkatnya kualitas pelaksanaan otonomi daerah yang diukur melalui persentase tertib administrasi pelaksanaan otonomi daerah; serta

meningkatnya kualitas pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah di lingkungan Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah dan Kerjasama serta Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat yang diukur melalui persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah. Penyajian capaian kinerja ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran mengenai tingkat keberhasilan pelaksanaan program serta efektivitas upaya yang telah dilakukan dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah yang akuntabel.

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2025			Target Akhir RPD
				Target	Realisasi	Presentase	
1	Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Kerjasama Daerah	Tingkat efektivitas kerjasama daerah	%	95	100	105,26	95
2	Meningkatnya Kualitas Rekomendasi Kebijakan Pemerintahan Umum	Persentase rekomendasi bidang administrasi pemerintahan, penataan wilayah dan pemerintahan umum yang ditindaklanjuti	%	95	100	105,26	95
3	Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Otonomi Daerah	Persentase tertib administrasi pelaksanaan otonomi daerah	%	95	100	105,26	95
4	Meningkatnya kualitas pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah dan Kerjasama dan Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Presentase tingkat pelayanan umum kepegawaian dan keuangan perangkat daerah Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah dan Kerjasama dan Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	%	100	100	100	100
		Indeks Kepuasan Masyarakat Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah dan Kerjasama	Angka	82,5	85,75	103,94	83
		Indek Manajemen Risiko Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah dan Kerjasama	Angka	3	2,71	90,33	3

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja Tahun 2025, secara umum seluruh sasaran program Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah dan Kerjasama menunjukkan capaian yang sangat baik dan melampaui target yang telah ditetapkan. Pada sasaran program meningkatnya kualitas pelaksanaan kerja sama daerah, indikator tingkat efektivitas kerja sama daerah ditargetkan sebesar 95 persen dan terealisasi sebesar 100 persen, sehingga menghasilkan capaian kinerja sebesar 105,26

persen, sekaligus melampaui target akhir RPD sebesar 95 persen. Demikian pula pada sasaran program meningkatnya kualitas rekomendasi kebijakan pemerintahan umum, indikator persentase rekomendasi bidang administrasi pemerintahan, penataan wilayah, dan pemerintahan umum yang ditindaklanjuti ditargetkan sebesar 95 persen dan terealisasi sebesar 100 persen, dengan capaian 105,26 persen dan telah memenuhi target akhir RPD. Selanjutnya, pada sasaran program meningkatnya kualitas pelaksanaan otonomi daerah, indikator persentase tertib administrasi pelaksanaan otonomi daerah juga ditargetkan sebesar 95 persen dan terealisasi sebesar 100 persen dengan capaian 105,26 persen, sehingga melampaui target yang ditetapkan. Adapun pada sasaran program meningkatnya kualitas pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah di lingkungan Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah dan Kerjasama serta Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, indikator persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah ditargetkan sebesar 100 persen dan terealisasi sebesar 100 persen, dengan capaian kinerja sebesar 100 persen, yang juga telah sesuai dengan target akhir RPD. Secara keseluruhan, capaian tersebut menunjukkan efektivitas pelaksanaan program serta konsistensi kinerja organisasi dalam mendukung pencapaian sasaran dan tujuan Sekretariat Daerah.

Tabel Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori	Sumber Data
1	Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Kerjasama Daerah	Tingkat efektivitas kerjasama daerah	95%	100%	105,26	Sangat Tinggi	e-controlling
2	Meningkatnya Kualitas Rekomendasi Kebijakan Pemerintahan Umum	Persentase rekomendasi bidang administrasi pemerintahan, penataan wilayah dan pemerintahan umum yang ditindaklanjuti	95%	100%	105,26	Sangat Tinggi	e-controlling
3	Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Otonomi Daerah	Persentase tertib administrasi pelaksanaan otonomi daerah	95%	100%	105,26	Sangat Tinggi	e-controlling
4	Meningkatnya kualitas pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat	Presentase tingkat pelayanan umum kepegawaian dan keuangan perangkat	100%	100%	100	Sangat Tinggi	e-controlling

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori	Sumber Data
	daerah Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah dan Kerjasama dan Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	daerah Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah dan Kerjasama dan Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat					
		Indeks Kepuasan Masyarakat Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah dan Kerjasama	82,5	85,75	103,94	Sangat Tinggi	Berdasarkan Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 oleh Biro Organisasi
		Indek Manajemen Risiko Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah dan Kerjasama	3	2,71	90,33	Sangat Tinggi	Berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi atas Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi Tahun 2025

Berdasarkan tabel perbandingan antara target dan realisasi kinerja Tahun 2025, seluruh sasaran program Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah dan Kerjasama menunjukkan capaian yang sangat tinggi. Pada sasaran meningkatnya kualitas pelaksanaan kerja sama daerah, indikator tingkat efektivitas kerja sama daerah ditargetkan sebesar 95 persen dan terealisasi sebesar 100 persen dengan capaian 105,26 persen, sehingga masuk dalam kategori sangat tinggi. Demikian pula pada sasaran meningkatnya kualitas rekomendasi kebijakan pemerintahan umum, indikator persentase rekomendasi bidang administrasi pemerintahan, penataan wilayah, dan pemerintahan umum yang ditindaklanjuti ditargetkan sebesar 95 persen dan terealisasi sebesar 100 persen dengan capaian 105,26 persen dan kategori sangat tinggi. Pada sasaran meningkatnya kualitas pelaksanaan otonomi daerah, indikator persentase tertib administrasi pelaksanaan otonomi daerah juga mencapai realisasi 100 persen dari target 95 persen dengan capaian 105,26 persen dan kategori sangat tinggi. Sementara itu, pada sasaran meningkatnya kualitas pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah di lingkungan Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah dan Kerjasama serta Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, indikator persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah ditargetkan sebesar 100 persen dan terealisasi sebesar 100 persen dengan capaian 100 persen dan tetap berada dalam kategori

sangat tinggi. Seluruh capaian tersebut bersumber dari data e-controlling, yang menunjukkan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan telah berjalan efektif, terukur, dan akuntabel sesuai dengan target yang ditetapkan.

Tabel Perbandingan antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan Tahun Sebelumnya

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	2023			2024			2025		
			Target	Realisasi	Capaian %	Target	Realisasi	Capaian %	Target	Realisasi	Capaian %
1	Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Kerjasama Daerah	Tingkat efektivitas kerjasama daerah	95	100	105,26	95	100	105,26	95	100	105,26
2	Meningkatnya Kualitas Rekomendasi Kebijakan Pemerintahan Umum	Persentase rekomendasi bidang administrasi pemerintahan, penataan wilayah dan pemerintahan umum yang ditindaklanjuti	90	100	111	95	100	105,26	95	100	105,26
3	Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Otonomi Daerah	Persentase tertib administrasi pelaksanaan otonomi daerah	95	100	105,26	95	100	105,26	95	100	105,26
4	Meningkatnya kualitas pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah Biro Pemerintahan , Otonomi Daerah dan Kerjasama dan Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Presentase tingkat pelayanan umum kepegawaian dan keuangan perangkat daerah Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah dan Kerjasama dan Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	100	100	100	100	100	100	100	100	100
		Indeks Kepuasan Masyarakat Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah dan Kerjasama	78,5	83	105,73	82	86,25	105,18	82,5	85,75	103,94

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	2023			2024			2025		
			Target	Realisasi	Capaian %	Target	Realisasi	Capaian %	Target	Realisasi	Capaian %
		Indek Manajemen Risiko Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah dan Kerjasama	Na	Na	Na	3	2,89	96,33	3	2,71	90,33

Berdasarkan perbandingan realisasi dan capaian kinerja selama periode Tahun 2023 sampai dengan Tahun 2025, kinerja Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah dan Kerjasama menunjukkan tren yang stabil dan konsisten pada kategori sangat tinggi. Pada sasaran program meningkatnya kualitas pelaksanaan kerja sama daerah, target kinerja selama tiga tahun berturut-turut ditetapkan sebesar 95 persen dengan realisasi yang konsisten mencapai 100 persen, sehingga menghasilkan capaian sebesar 105,26 persen setiap tahunnya. Pada sasaran program meningkatnya kualitas rekomendasi kebijakan pemerintahan umum, terdapat peningkatan konsistensi penetapan target, yaitu dari 90 persen pada Tahun 2023 dengan capaian 111 persen, menjadi 95 persen pada Tahun 2024 dan 2025 dengan realisasi tetap 100 persen dan capaian 105,26 persen. Selanjutnya, pada sasaran program meningkatnya kualitas pelaksanaan otonomi daerah, target sebesar 95 persen selama tiga tahun terakhir juga terealisasi sebesar 100 persen dengan capaian 105,26 persen secara konsisten. Adapun pada sasaran program meningkatnya kualitas pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah, target dan realisasi selama Tahun 2023 hingga 2025 konsisten sebesar 100 persen dengan capaian 100 persen. Secara keseluruhan, data tersebut menunjukkan bahwa kinerja organisasi tidak hanya mampu mempertahankan capaian pada kategori sangat tinggi, tetapi juga menunjukkan konsistensi dan stabilitas dalam pencapaian sasaran strategis dari tahun ke tahun.

Tabel Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Target Akhir 2026

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Capaian 2025	Target Akhir 2026	Tingkat Kemajuan
1	Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Kerjasama Daerah	Tingkat efektivitas kerjasama daerah	100%	95%	105,26%
2	Meningkatnya Kualitas Rekomendasi Kebijakan Pemerintahan Umum	Persentase rekomendasi bidang administrasi pemerintahan, penataan wilayah dan pemerintahan umum yang ditindaklanjuti	100%	95%	105,26%
3	Meningkatnya Kualitas	Persentase tertib administrasi pelaksanaan otonomi daerah	100%	95%	105,26%

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Capaian 2025	Target Akhir 2026	Tingkat Kemajuan
	Pelaksanaan Otonomi Daerah				
4	Meningkatnya kualitas pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah dan Kerjasama dan Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Presentase tingkat pelayanan umum kepegawaian dan keuangan perangkat daerah Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah dan Kerjasama dan Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	100%	100%	100%
		Indeks Kepuasan Masyarakat Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah dan Kerjasama	85,75	83	103,94%
		Indek Manajemen Risiko Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah dan Kerjasama	2,71	3	90,33%

Berdasarkan perbandingan antara realisasi kinerja tahun 2025 dengan target akhir Tahun 2026, seluruh sasaran program Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah dan Kerjasama menunjukkan capaian yang telah memenuhi bahkan melampaui target jangka menengah yang ditetapkan. Pada sasaran program meningkatnya kualitas pelaksanaan kerja sama daerah, capaian tahun 2025 sebesar 100 persen telah melampaui target akhir tahun 2026 sebesar 95 persen, dengan tingkat kemajuan mencapai 105,26 persen. Kondisi serupa juga terlihat pada sasaran program meningkatnya kualitas rekomendasi kebijakan pemerintahan umum serta meningkatnya kualitas pelaksanaan otonomi daerah, dimana capaian Tahun 2025 masing-masing sebesar 100 persen telah melampaui target akhir tahun 2026 sebesar 95 persen dengan tingkat kemajuan 105,26 persen. Sementara itu, pada sasaran program meningkatnya kualitas pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah, capaian tahun 2025 sebesar 100 persen telah sesuai dengan target akhir tahun 2026 sebesar 100 persen, sehingga tingkat kemajuan mencapai 100 persen. Secara keseluruhan, hasil tersebut menunjukkan bahwa realisasi kinerja hingga tahun 2025 telah berada pada jalur yang tepat dan secara substansial telah memenuhi target akhir tahun 2026, mencerminkan konsistensi dan efektivitas pelaksanaan program dalam mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Sekretariat Daerah.

Tabel Analisis Penyebab Keberhasilan Tahun 2025

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)	Analisa Keberhasilan / Kegagalan	Solusi yang dilakukan
1	Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Kerjasama Daerah	Tingkat efektivitas kerjasama daerah	100%	95%	105,26%	Tercapainya tujuan kerjasama daerah dengan jumlah tujuan kerjasama daerah	Nihil
2	Meningkatnya Kualitas Rekomendasi Kebijakan Pemerintahan Umum	Persentase rekomendasi bidang administrasi pemerintahan, penataan wilayah dan pemerintahan umum yang ditindaklanjuti	100%	95%	105,26%	Tersusunnya dokumen rekomendasi bidang administrasi pemerintahan, penataan wilayah, dan pemerintahan umum telah ditindaklanjuti	Nihil
3	Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Otonomi Daerah	Persentase tertib administrasi pelaksanaan otonomi daerah	100%	95%	105,26%	Tersusunnya dokumen adminstrasi pelaksanaan otonomi daerah telah dipenuhi sesuai kaidah dengan dokumen adminstrasi pelaksanaan otonomi daerah	Nihil
4	Meningkatnya kualitas pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah dan Kerjasama dan Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Presentase tingkat pelayanan umum kepegawaian dan keuangan perangkat daerah Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah dan Kerjasama dan Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	100%	100%	100%	Terukurnya rata rata dari tingkat ketercapaian kegiatan pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah dan Kerjasama dan Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Nihil

Berdasarkan hasil analisis penyebab keberhasilan kinerja Tahun 2025, seluruh sasaran program Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah dan Kerjasama menunjukkan capaian yang sangat tinggi, yang didukung oleh faktor-faktor implementatif dan administratif yang berjalan efektif. Pada sasaran program meningkatnya kualitas pelaksanaan kerja sama daerah, keberhasilan ditunjukkan

oleh tercapainya tujuan kerja sama daerah sesuai dengan jumlah usulan kerja sama yang direalisasikan, sehingga indikator tingkat efektivitas kerja sama daerah mampu melampaui target yang ditetapkan. Pada sasaran program meningkatnya kualitas rekomendasi kebijakan pemerintahan umum, capaian didukung oleh tersusunnya dokumen rekomendasi bidang administrasi pemerintahan, penataan wilayah, dan pemerintahan umum yang telah ditindaklanjuti sesuai ketentuan. Selanjutnya, pada sasaran program meningkatnya kualitas pelaksanaan otonomi daerah, keberhasilan dipengaruhi oleh tersusunnya dokumen administrasi pelaksanaan otonomi daerah yang telah sesuai dengan kaidah dan ketentuan administrasi yang berlaku. Adapun pada sasaran program meningkatnya kualitas pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah, capaian optimal didukung oleh tercukupinya rata-rata daya dukung administrasi dan tata kelola pelayanan umum, kepegawaian, serta keuangan perangkat daerah di lingkungan Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah dan Kerjasama dan Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat. Secara umum, keberhasilan tersebut menunjukkan bahwa pengelolaan program telah dilaksanakan secara sistematis, terukur, dan sesuai dengan standar administrasi yang ditetapkan.

Tabel Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Tahun 2025

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja			Anggaran			Tingkat Efisiensi
		Target	Realisasi	% Capaian	Anggaran (Rp)	Realisasi (%)	% Capaian	
1	Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Kerjasama Daerah	100	95	105,26	1.507.813.000	1.197.188.314	79,40	24,57%
2	Meningkatnya Kualitas Rekomendasi Kebijakan Pemerintahan Umum	100	95	105,26	698.403.000	696.838.766	98,62	5,21%
3	Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Otonomi Daerah	100	95	105,26	1.040.001.000	1.025.690.000	99,78	6,30%
4	Meningkatnya kualitas pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah dan Kerjasama dan Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	100	100	100	711.956.000	710.619.033	99,81	0,19%

Berdasarkan hasil analisis efisiensi penggunaan sumber daya Tahun 2025, seluruh sasaran program Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah dan Kerjasama menunjukkan capaian kinerja yang sangat tinggi dengan tingkat efisiensi anggaran yang bervariasi dan tetap terkendali. Pada sasaran program meningkatnya kualitas pelaksanaan kerja sama daerah, dengan capaian kinerja sebesar 105,26 persen, realisasi anggaran sebesar Rp1.197.188.314 dari pagu Rp1.507.813.000 atau sebesar 79,40 persen, menghasilkan tingkat efisiensi sebesar 24,57 persen. Pada sasaran program meningkatnya kualitas rekomendasi kebijakan pemerintahan umum, capaian kinerja sebesar 105,26 persen didukung oleh realisasi anggaran sebesar Rp696.838.766 dari pagu Rp698.403.000 atau sebesar 98,62 persen, dengan tingkat efisiensi 5,21 persen. Selanjutnya, pada sasaran program meningkatnya kualitas pelaksanaan otonomi daerah, dengan capaian 105,26 persen, realisasi anggaran sebesar Rp1.025.690.000 dari pagu Rp1.040.001.000 atau sebesar 99,78 persen, menghasilkan efisiensi sebesar 6,30 persen. Adapun pada sasaran program meningkatnya kualitas pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah, capaian kinerja sebesar 100 persen didukung oleh realisasi anggaran sebesar Rp710.619.033 dari pagu Rp711.956.000 atau sebesar 99,81 persen, dengan tingkat efisiensi sebesar 0,19 persen. Secara keseluruhan, data tersebut menunjukkan bahwa capaian kinerja yang tinggi dapat direalisasikan dengan pengelolaan anggaran yang efisien dan proporsional, mencerminkan optimalisasi penggunaan sumber daya dalam mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Sekretariat Daerah.

Tabel Analisis Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Pencapaian Pernyataan Kinerja

No	Program	Indikator Kinerja	% Capaian	Kegiatan	Indikator Kinerja	% Capaian	Menunjang / Tidak Menunjang
1	Program Pemerintahan Dan Otonomi Daerah	Tingkat efektivitas kerjasama daerah	105,26	Fasilitasi Kerjasama Daerah	Persentase naskah kerjasama antar pemerintah yang ditindaklanjuti	105,26	Menunjang
					Persentase naskah kerjasama Lembaga, Badan Usaha Dan Swasta yang ditindaklanjuti	105,26	Menunjang
					Persentase rekomendasi atas evaluasi kerjasama daerah	105,26	Menunjang

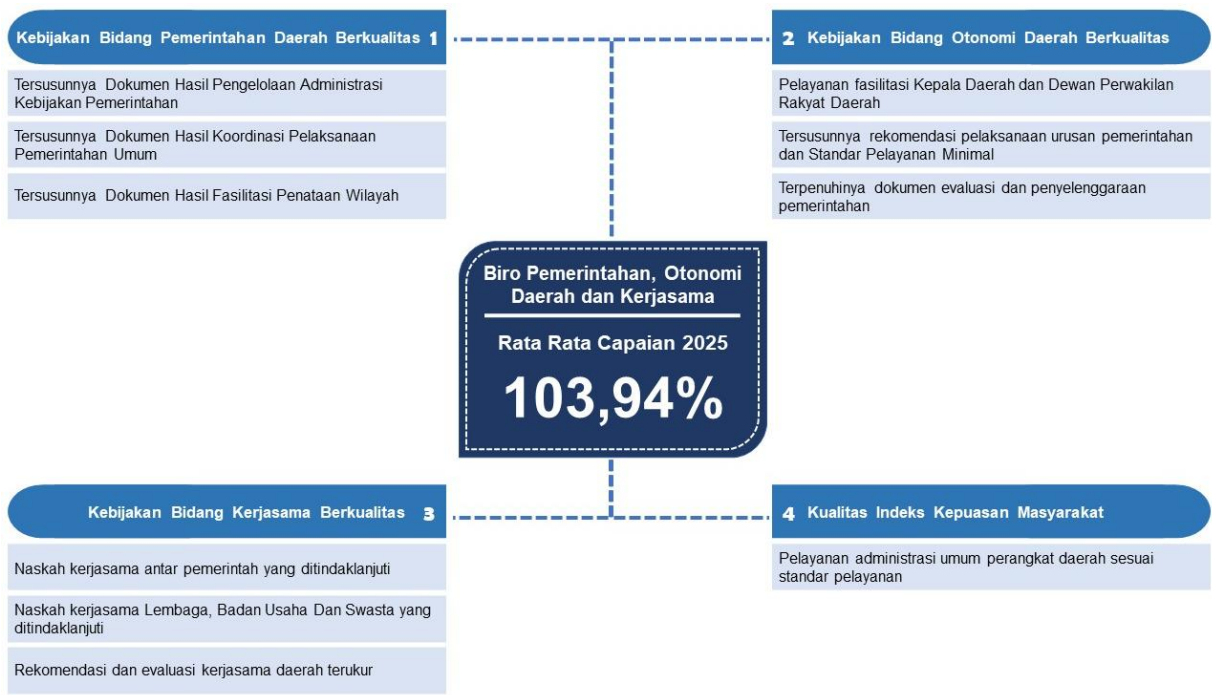
No	Program	Indikator Kinerja	% Capaian	Kegiatan	Indikator Kinerja	% Capaian	Menunjang / Tidak Menunjang
		Persentase rekomendasi bidang administrasi pemerintahan, penataan wilayah dan pemerintahan umum yang ditindaklanjuti	105,26	Pelaksanaan Tugas Pemerintahan	Jumlah dokumen rekomendasi kebijakan bidang pemerintahan, penataan wilayah dan LKPJ	100	Menunjang
		Persentase tertib administrasi pelaksanaan otonomi daerah	105,26	Pelaksanaan Otonomi Daerah	Persentase layanan fasilitasi KDH dan DPRD	105,26	Menunjang
					Jumlah rekomendasi pelaksanaan urusan pemerintahan dan SPM	100	Menunjang
					Persentase pemenuhan dokumen evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan	100	Menunjang
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Presentase tingkat pelayanan umum kepegawaian dan keuangan perangkat daerah Biro Pemerintahan , Otonomi Daerah dan Kerjasama dan Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	100	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan Biro Pemerintahan , Otonomi Daerah dan Kerjasama dan Asisten Pemerintahan Kesra	100	Menunjang

Berdasarkan analisis keterkaitan antara program, kegiatan, dan indikator kinerja, seluruh kegiatan yang dilaksanakan pada Tahun 2025 terbukti menunjang pencapaian sasaran program. Pada Program Pemerintahan dan Otonomi Daerah, indikator tingkat efektivitas kerja sama daerah dengan capaian 105,26 persen didukung oleh kegiatan fasilitasi kerja sama daerah, yang menghasilkan persentase realisasi kerja sama antar pemerintah yang ditindaklanjuti serta kerja sama dengan lembaga, badan usaha, dan swasta yang ditindaklanjuti secara optimal, seluruhnya dengan capaian di atas 100 persen dan berkategori menunjang. Selain itu, keberhasilan indikator persentase rekomendasi bidang administrasi pemerintahan,

penataan wilayah, dan pemerintahan umum yang ditindaklanjuti juga ditopang oleh pelaksanaan tugas pemerintahan umum, termasuk tersusunnya dokumen kebijakan dan rekomendasi yang relevan serta tindak lanjut hasil evaluasi kerja sama daerah.

Pada indikator persentase tertib administrasi pelaksanaan otonomi daerah dengan capaian 105,26 persen, keberhasilan tersebut didukung oleh pelaksanaan kegiatan otonomi daerah yang menghasilkan dokumen administrasi, laporan pelaksanaan, serta evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah secara tertib dan sesuai ketentuan. Sementara itu, pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi, capaian indikator persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah sebesar 100 persen didukung oleh kegiatan administrasi perangkat daerah yang menghasilkan tertib administrasi umum, keuangan, dan kepegawaian secara konsisten. Secara keseluruhan, seluruh kegiatan yang dilaksanakan pada Tahun 2025 memiliki keterkaitan langsung dan kontribusi nyata terhadap pencapaian indikator kinerja, sehingga secara substantif dinilai efektif dan menunjang keberhasilan pencapaian sasaran program.

Beberapa faktor yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian target kinerja Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah dan Kerjasama yang telah ditetapkan dapat dilihat pada gambar dibawah ini:



Berdasarkan gambar diatas, **faktor pertama** pencapaian kinerja Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah dan Kerjasama dipengaruhi oleh meningkatnya kualitas rekomendasi kebijakan pemerintahan umum, yang ditandai dengan realisasi 100 persen. Pencapaian tersebut didukung oleh:

- 1** Meningkatnya kualitas fasilitasi pelaksanaan kebijakan administrasi pemerintahan, yang ditandai dengan tersusunnya dokumen hasil pengelolaan administrasi kebijakan pemerintahan sejumlah 4 (empat) dokumen. Didukung dengan realisasi keuangan Rp429.695.480,00 dari Rp431.051.000,00 atau tingkat efisiensi sebesar 0,31 persen. Upaya yang mendorong meningkatnya kualitas fasilitasi pelaksanaan kebijakan administrasi pemerintahan, yaitu:
 - a. Tersusunnya Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Jawa Tengah Tahun Anggaran 2024;
 - b. Tersusunnya Persetujuan Gubernur atas pembentukan kelurahan Dukuh Asri;
 - c. Tersusunnya Persetujuan Gubernur atas pembentukan kelurahan Dukuh Krajan;
 - d. Tersusunnya Persetujuan Gubernur atas pembentukan kelurahan Mangunsari Lor;
 - e. Tersusunnya Persetujuan Gubernur atas pembentukan kelurahan Mangunsari Kidul; dan
 - f. Tersusunnya Rancangan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Jawa Tengah Tahun Anggaran 2025.
- 2** Meningkatnya kualitas fasilitasi dan koordinasi pelaksanaan ketentraman dan ketertiban umum, yang ditandai dengan tersusunnya dokumen hasil koordinasi pelaksanaan pemerintahan umum sejumlah 4 (empat) dokumen. Didukung dengan realisasi keuangan Rp142.919.786,00 dari Rp143.071.000,00 atau tingkat efisiensi sebesar 0,11 persen. Upaya yang mendorong meningkatnya kualitas fasilitasi dan koordinasi pelaksanaan ketentraman dan ketertiban umum, yaitu:
 - a. Terfasilitasinya Pengadaan Tanah Pembangunan Jaringan Irigasi Daerah Irigasi Jlantah;
 - b. Terfasilitasinya Penambahan Lahan Pembangunan Jalan Tol Solo-Yogyakarta-Kulon Progo Seksi I;
 - c. Terfasilitasinya Pengadaan Tanah Pembangunan Bufferzone Area OM 70 dan Kilang PT. KPI RU IV Cilacap;
 - d. Terfasilitasinya Pengadaan Tanah Atas Sisa Tanah Pembangunan Bendungan Jlantah (Perpanjangan);
 - e. Terfasilitasinya Pengadaan Tanah Pembangunan Jaringan Irigasi Pidekso (Perpanjangan);
 - f. Terfasilitasinya Pengadaan Tanah Atas Sisa Tanah Pembangunan Jalan Tol Semarang-Demak;

- g. Terfasilitasinya Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan Tol Semarang-Demak;
- h. Terfasilitasinya Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan *Flood Management In North Java Project* (FMNJP) Sungai Wulan;
- i. Terfasilitasinya Permasalahan Pertanahan terkait Pelaksanaan Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan Tol Semarang-Demak;
- j. Terfasilitasinya Permasalahan Pertanahan Penyerobotan Bidang Tanah Dukuh margorejo Kecamatan Dawe Kabupaten Kudus;
- k. Terfasilitasinya Permasalahan Pertanahan Dusun Tinggen Desa Manjungan Kecamatan Ngawen Kabupaten Klaten;
- l. Terfasilitasinya Penanganan Unjuk Rasa/Audiensi sejumlah 48 unjuk rasa.

3

Meningkatnya kualitas fasilitasi penataan wilayah, yang ditandai dengan tersusunnya dokumen hasil fasilitasi penataan wilayah sejumlah 4 (empat) dokumen. Didukung dengan realisasi keuangan Rp124.223.500,00 dari Rp124.281.000,00 atau tingkat efisiensi sebesar 0,05 persen. Upaya yang mendorong meningkatnya kualitas fasilitasi penataan wilayah yaitu:

- a. Terfasilitasinya sengketa batas wilayah antar provinsi di 7 (tujuh) segmen batas meliputi:
 - 1) Batas Daerah antara Kabupaten Wonogiri dengan Kabupaten Pacitan;
 - 2) Batas Daerah antara Kabupaten Grobogan dengan Kabupaten Ngawi;
 - 3) Batas Daerah antara Kabupaten Magelang dengan Kabupaten Sleman;
 - 4) Batas Daerah antara Kabupaten Klaten dengan Kabupaten Sleman;
 - 5) Batas Daerah antara Kabupaten Sukoharjo dengan Kabupaten Gunungkidul;
 - 6) Batas Daerah Kabupaten Wonogiri dengan kabupaten Gunungkidul; dan
 - 7) Batas Daerah antara Kabupaten Brebes dengan Kabupaten Cirebon.
- b. Terfasilitasinya sengketa 8 (delapan) segmen batas wilayah antar kabupaten kota dalam provinsi dan 3 (tiga) simpul batas kabupaten kota meliputi:
 - 1) Batas Daerah antara Kabupaten Brebes dengan Kabupaten Tegal;
 - 2) Batas Daerah antara Kabupaten Sragen dengan Kabupaten Grobogan;
 - 3) Batas Daerah antara Kabupaten Kudus dengan Kabupaten Jepara;

- 4) Batas Daerah antara Kabupaten Kendal dengan Kabupaten Semarang;
 - 5) Batas Daerah antara Kabupaten Karanganyar dengan Wonogiri;
 - 6) Batas Daerah antara Kabupaten Karanganyar dengan Kabupaten Sragen;
 - 7) Batas Daerah antara Kabupaten Boyolali dengan Kabupaten Karanganyar;
 - 8) Batas Daerah antara Kabupaten Wonosobo dengan Kota Banjarnegara;
 - 9) Simpul Batas Daerah Kabupaten Banjarnegara dengan Kabupaten Wonosobo dan kabupaten Batang;
 - 10) Simpul Batas Daerah Kabupaten Jepara dengan Kabupaten Kudus dan Kabupaten Demak; dan
 - 11) Simpul Batas Daerah Kabupaten Pemalang dengan Kabupaten Purbalingga Dan Kabupaten Banyumas.
- c. Tertandatangani 4 (empat) Berita Acara Penelaahan Nama Rupabumi sebanyak 1.245 data, 6 (enam) Berita Acara Rekomendasi 3.246 Nama Rupabumi;
 - d. Terlaksananya 14 (empat belas) kali fasilitasi penyelenggaraan nama rupabumi di 10 (sepuluh) Kabupaten/Kota meliputi Kabupaten Kendal, Kabupaten Demak, Kabupaten Pati, Kabupaten Sukoharjo, Kabupaten Banyumas, Kabupaten Temanggung, Kabupaten Sukoharjo, Kabupaten Klaten, Kabupaten Kudus, dan Kota Semarang; dan
 - e. Tersusunnya 3 (tiga) buku kode data wilayah administrasi dan pulau Provinsi Jawa Tengah.

Faktor kedua yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian target kinerja Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah dan Kerjasama adalah meningkatnya kualitas pelaksanaan otonomi daerah yang ditandai dengan realisasi 100 persen. Pencapaian tersebut didukung oleh:

- 1** Meningkatnya kualitas tertib administrasi Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang ditandai dengan capaian presentase layanan fasilitasi Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebesar 100 persen. Didukung dengan realisasi keuangan Rp460.223.400,00 dari Rp464.007.000,00 atau tingkat efisiensi sebesar 0,82 persen. Upaya yang mendorong meningkatnya kualitas tertib administrasi Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yaitu:
 - a. Terlaksananya Pelantikan Penjabat Bupati Kudus Tahun 2025;

- b. Terlaksananya Pelantikan Penjabat Bupati Tegal Tahun 2025;
- c. Terfasilitasinya Usulan Pengangkatan Bupati / Wakil Bupati dan Wali Kota / Wakil Wali Kota hasil Pemilihan Kepala Daerah 2024;
- d. Terlaksananya Persiapan Serah Terima Jabatan Pj. Gubernur Jawa Tengah pada Gubernur Jawa Tengah Hasil Pemilihan Kepala Daerah 2024;
- e. Terlaksananya Monitoring Pelaksanaan Hak Angket DPRD pada Wali Kota Salatiga;
- f. Terlaksananya Monitoring Pelaksanaan Hak Angket DPRD pada Bupati Pati;
- g. Terfasilitasinya Usulan Pensiun Mantan KDH dan Wakil KDH Hasil Pilkada serentak Tahun 2020;
- h. Terfasilitasinya Penggantian Antarwaktu Anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah;
- i. Terfasilitasinya Penggantian Antarwaktu Anggota DPRD Kabupaten/Kota; dan
- j. Terfasilitasinya Penggantian Pimpinan DPRD Kabupaten/Kota.

2

Meningkatnya kualitas pengembangan otonomi dan penataan urusan yang ditandai dengan tersusunnya rekomendasi pelaksanaan urusan pemerintahan dan Standar Pelayanan Minimal sejumlah 3 (tiga) Dokumen. Didukung dengan realisasi keuangan Rp133.800.000,00 dari Rp139.228.000,00 atau tingkat efisiensi sebesar 3,90 persen. Upaya yang mendorong meningkatnya kualitas pengembangan otonomi dan penataan urusan, yaitu:

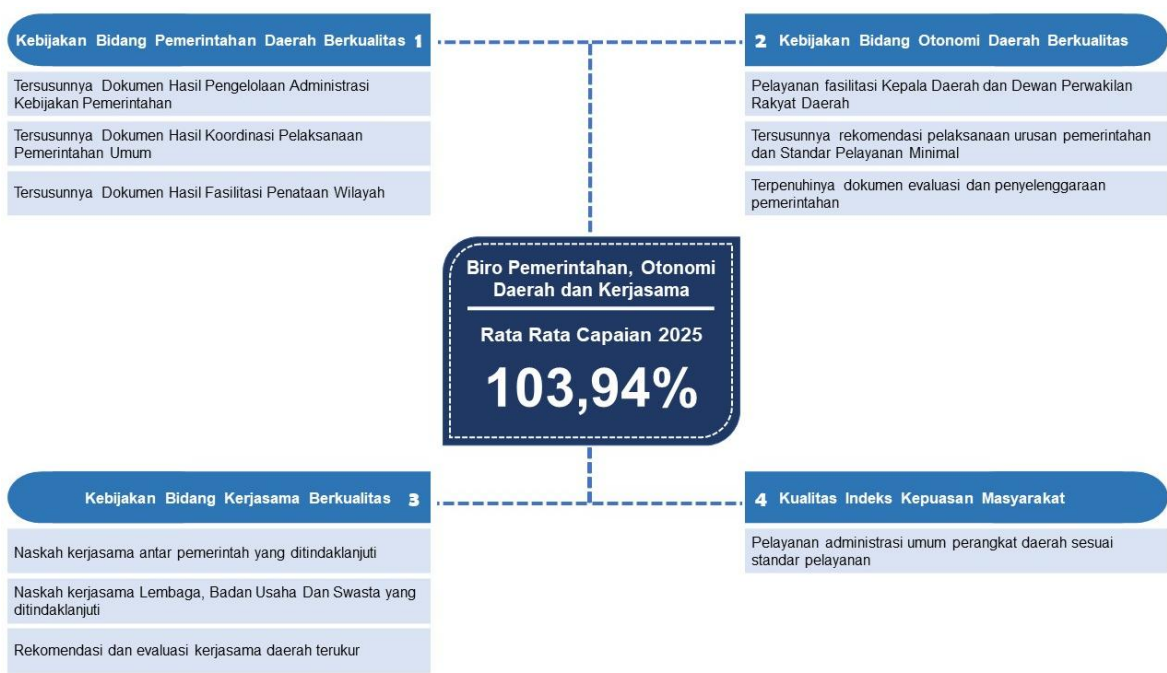
- a. Tersusunnya Laporan Penerapan Standar Pelayanan Minimal Provinsi Jawa Tengah tahun 2024;
- b. Tersusunnya Laporan Monitoring dan Evaluasi Standar Pelayanan Minimal Tahun 2025;
- c. Tersusunnya Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 100.3.3.1/390 tentang Penetapan Target Standar Pelayanan Minimal 2025;
- d. Tersusunnya Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 100.3.3.1/391 tentang Penetapan Target Standar Pelayanan Minimal 2026;
- e. Tersusunnya Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 100.3.3.1/443 tentang Tim Penyelesaian Administrasi Perubahan SOTK.

3

Meningkatnya kualitas tertib administrasi evaluasi dan penyelenggaraan pemerintahan yang ditandai dengan capaian presentase pemenuhan

dokumen evaluasi dan penyelenggaraan pemerintahan sebesar 100 persen. Didukung dengan realisasi keuangan Rp431.666.600,00 dari Rp436.766.000,00 atau tingkat efisiensi sebesar 1,17 persen. Upaya yang mendorong meningkatnya kualitas tertib administrasi evaluasi dan penyelenggaraan pemerintahan, yaitu:

- a. Tersusunnya Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Tengah;
- b. Tersusunnya Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Tengah;
- c. Tersusunnya Hasil Evaluasi Penyelenggaraan pemerintahan Daerah Atas Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten dan Kota di Jawa Tengah; dan
- d. Tersusunnya Hasil Kajian Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Terkait Pemekaran Kabupaten Banyumas dan Brebes.



Faktor ketiga yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian target kinerja Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah dan Kerjasama adalah meningkatnya kualitas pelaksanaan kerjasama daerah yang ditandai dengan realisasi 100 persen. Pencapaian tersebut didukung oleh:

- 1 Meningkatkan koordinasi, sinkronisasi, fasilitasi, monitoring dan evaluasi kebijakan kerjasama antar pemerintah yang ditandai dengan capaian persentase naskah kerjasama antar pemerintah yang ditindaklanjuti sebesar 100 persen. Didukung dengan realisasi keuangan Rp822.740.527,00 dari Rp1.131.875.000,00 atau tingkat efisiensi sebesar 27,31 persen. Upaya yang

mendorong meningkatkan koordinasi, sinkronisasi, fasilitasi, monitoring dan evaluasi kebijakan kerjasama antar pemerintah, yaitu:

- a. Terfasilitasinya kerja sama sinergi dengan Kementerian/Lembaga RI dengan keluaran 10 (sepuluh) naskah kerjasama dengan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Pekerjaan Umum; Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; Ombudsman; Pengadilan Tinggi Agama Semarang; Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, Badan Pusat Statistik, 35 (tiga puluh lima) Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Se Jawa Tengah; Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah; Direktorat Jendral Sains dan Teknologi, Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi; Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Tengah; dan Badan Riset dan Inovasi Nasional.
- b. Terfasilitasinya Kerja Sama Daerah dengan Daerah dengan keluaran 4 (empat) Naskah Kesepakatan Bersama dengan Pemerintah Provinsi/Kabupaten Lain; 22 (dua puluh dua) Naskah Perjanjian Kerja Sama dengan Pemerintah Provinsi/Kabupaten Lain.
- c. Terfasilitasinya Kerja Sama Daerah dengan Pemerintah Luar Negeri dengan keluaran 4 (Empat) *Memorandum of Understanding* (MoU) *Sister Province* yaitu Fujian, RRT; Chungcheongbuk-do, Korsel; Queensland, Australia; dan Siem Reap, Kamboja; Penerimaan 27 (dua puluh tujuh) Delegasi Luar Negeri diantaranya Inggris, RRT, Australia, New Zealand dan Brunnei Darussalam; 1 (satu) *Memorandum of Understanding* (MoU) kerjasama teknis sektor perikanan dan kelautan dengan Fujian, RRT.

2

Meningkatkan koordinasi, sinkronisasi, fasilitasi, monitoring dan evaluasi kebijakan kerjasama Lembaga, Badan Usaha Dan Swasta yang ditandai dengan capaian persentase naskah kerjasama Lembaga, Badan Usaha Dan Swasta yang ditindaklanjuti sebesar 100 persen. Didukung dengan realisasi keuangan Rp141.627.080,00 dari Rp142.746.000,00 atau tingkat efisiensi sebesar 0,78 persen. Upaya yang mendorong meningkatkan koordinasi, sinkronisasi, fasilitasi, monitoring dan evaluasi kebijakan kerjasama Lembaga, Badan Usaha Dan Swasta, yaitu:

- a. Terfasilitasinya Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga dengan keluaran Kerja Sama dengan 44 (empat puluh empat) Perguruan Tinggi menghasilkan 44 (empat puluh empat) Naskah Kesepakatan Bersama dan 67 (enam puluh tujuh) Perjanjian Kerja Sama; Kerja Sama dengan 15 (lima belas) Perguruan Tinggi dengan Dinas Perumahan Rakyat dan

Kawasan Pemukiman; Kerja Sama dengan 24 (dua puluh empat) Perguruan Tinggi dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah; Kerja Sama dengan Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama; Kerja Sama dengan Pengurus Wilayah Muhammadiyah; Kerja Sama dengan PT Impala dan PT Cassanatama.

- b. Terfasilitasinya Penerusan Kerjasama dengan IGO/INGO di Jawa Tengah dengan keluaran penandatanganan 4 (empat) RKT Penerusan Kerjasama INGO di Jawa Tengah yaitu ASB, CFI, AHF, dan Rikolto; dan Penandatanganan 1 (satu) KSB antara Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dengan Mercy Corps Indonesia (MCI).
- c. Terfasilitasinya Kerjasama dengan Badan Usaha dengan keluaran Penandatanganan 2 (dua) KSB antara Jawa Tengah dengan KIK dan KITB tentang kerjasama pemabangunan ekonomi dan Sumber Daya Manusia; Peningkatan kerjasama pembangunan, pendidikan, vokasi dan ketenagakerjaan di Jawa Tengah; Penandatanganan 5 (lima) PKS antara Jawa Tengah dengan 5 (lima) tenant di KIK yaitu PT. Polygroup Manufacture Indonesia, PT. Sasakura Indonesia, PT. Eclat Textile Int., PT. Borine Technology Indonesia, dan PT. Royal Regent Indonesia.

3 Meningkatnya Kualitas Evaluasi Pelaksanaan Kerjasama yang ditandai dengan capaian persentase rekomendasi atas evaluasi kerjasama daerah sebesar 100 persen. Didukung dengan realisasi keuangan Rp232.820.707,00 dari Rp233.192.000,00 atau tingkat efisiensi sebesar 0,16 persen. Upaya yang mendorong meningkatnya Kualitas Evaluasi Pelaksanaan Kerjasama, yaitu:

- a. Terfasilitasinya Izin Perjalanan ke Luar Negeri sejumlah 198 (seratus sembilan puluh delapan) Pengajuan izin perjalanan ke luar negeri baik dinas maupun alasan penting bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Aparatur Sipil Negara se-Jawa Tengah.
- b. Tersusunnya Laporan Evaluasi Pelaksanaan Kerjasama tahun 2025.

Faktor keempat yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian target kinerja Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah dan Kerjasama adalah meningkatnya kualitas pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah yang ditandai dengan realisasi 100 persen. Pencapaian tersebut didukung oleh:

1 Meningkatnya kualitas penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah yang ditandai dengan tersusunnya laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah sejumlah 12 (dua belas) laporan. Didukung dengan realisasi keuangan

Rp673.988.078,00 dari Rp675.230.000,00 atau tingkat efisiensi sebesar 0,18 persen. Upaya yang mendorong meningkatnya kualitas penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah, yaitu:

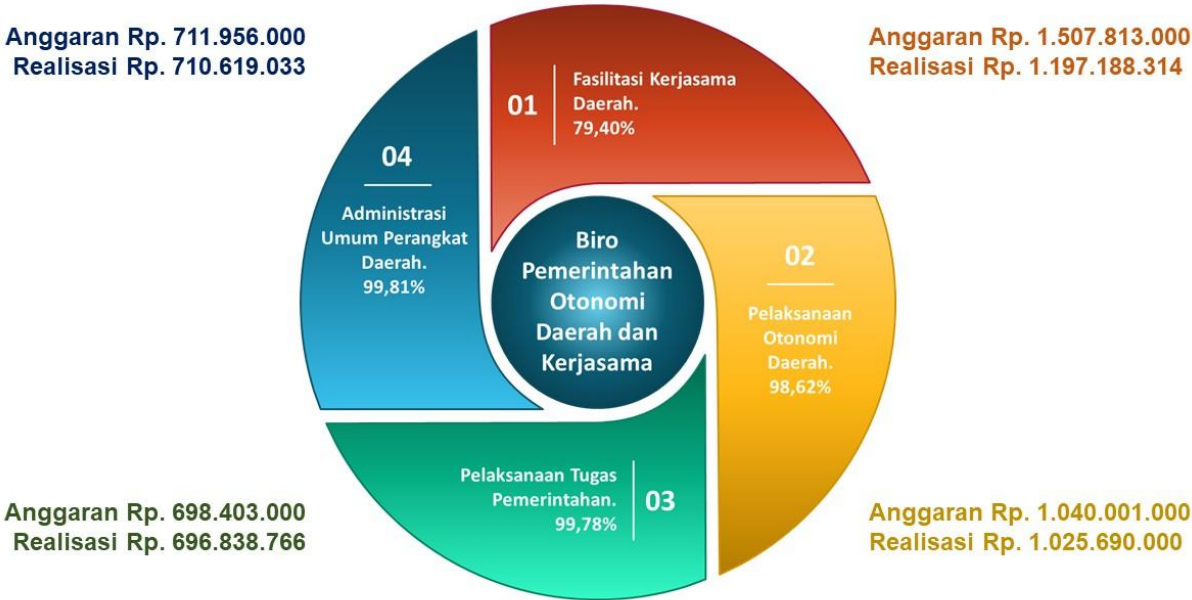
- a. Tersusunnya bahan laporan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Sekretariat Daerah;
- b. Tersusunnya bahan laporan pelaksanaan Reformasi Birokrasi Sekretariat Daerah;
- c. Tersusunnya bahan laporan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Sekretariat Daerah;
- d. Tersusunnya Manajemen Risiko;
- e. Tersusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah dan Kerjasama tahun 2024;
- f. Tersusunnya Laporan Pengendalian Operasional Kegiatan tahun 2024;
- g. Tersusunnya Laporan Tingkat Kematangan Organisasi Daerah; dan
- h. Tersusunnya Laporan Tatalaksana tahun 2025.

2

Meningkatnya kualitas penatausahaan arsip dinamis pada perangkat daerah yang ditandai dengan tersusunnya dokumen penatausahaan arsip dinamis pada perangkat daerah sejumlah 12 (dua belas) laporan. Didukung dengan realisasi keuangan Rp36.630.955,00 dari Rp36.726.000,00 atau tingkat efisiensi sebesar 0,26 persen. Upaya yang mendorong meningkatnya kualitas penatausahaan arsip dinamis pada perangkat daerah, yaitu:

- a. Tersusunnya laporan Administrasi Umum;
- b. Tersusunnya laporan Administrasi Kepegawain;
- c. Tersusunnya laporan Administrasi Perencanaan; dan
- d. Tersusunnya laporan Administrasi Keuangan.

Realisasi Anggaran



Program	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
Program Pemerintahan dan Otonomi Daerah	3.246.217.000	2.919.717.080	89,94
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	711.956.000	710.619.033	99,81
Total	3.958.173.000	3.630.336.113	91,72

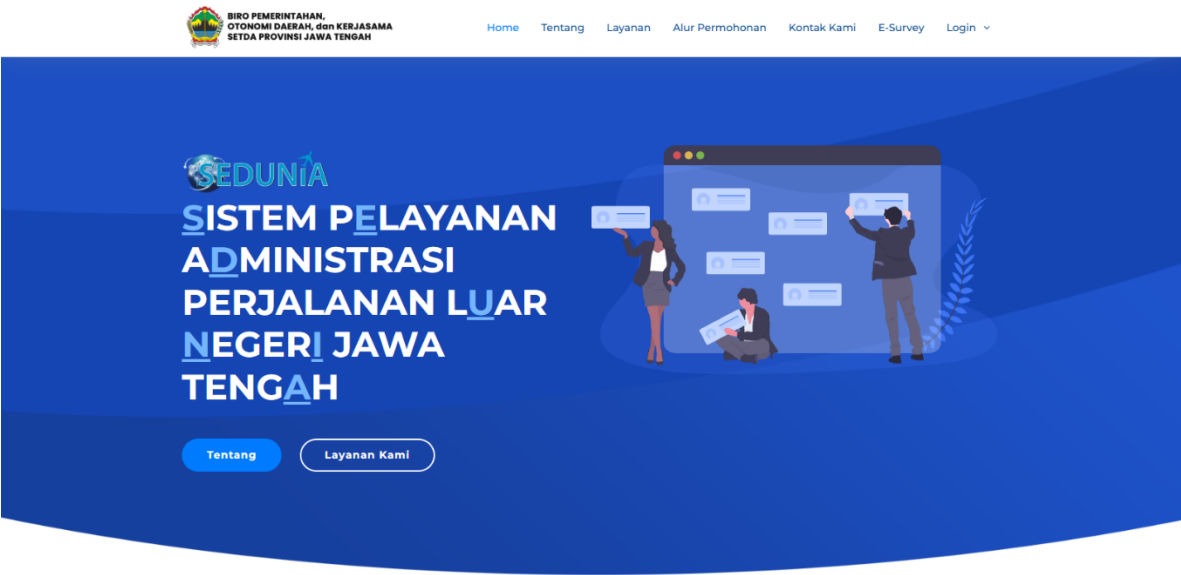
Seuai dengan gambar diatas bahwa capaian realisasi anggaran atas pencapaian 4 (empat) kegiatan pada tahun 2025 sebesar Rp3.630.336.113,00 atau dengan presentase sebesar 91,72 persen, dengan rincian sebagai berikut:

- 1
- Pencapaian indikator program **tingkat efektivitas kerjasama daerah** menggunakan anggaran senilai Rp1.197.188.314,00 dari alokasi anggaran Rp1.507.813.000,00. Sehingga terdapat efisiensi anggaran sebesar Rp 310.624.686,00 atau dengan presentase 20,60 persen;
- 2
- Pencapaian indikator program **persentase tertib administrasi pelaksanaan otonomi daerah** menggunakan anggaran senilai Rp1.025.690.000,00 dari alokasi anggaran Rp1.040.001.000,00. Sehingga terdapat efisiensi anggaran sebesar Rp14.311.000,00 atau dengan presentase 1,38 persen;
- 3
- Pencapaian indikator program **persentase rekomendasi bidang administrasi pemerintahan, penataan wilayah dan pemerintahan umum yang ditindaklanjuti** menggunakan anggaran senilai Rp696.838.766,00 dari alokasi anggaran Rp698.403.000,00. Sehingga terdapat efisiensi anggaran sebesar Rp1.564.234,00 atau dengan presentase 0,22 persen; dan
- 4
- Pencapaian indikator program **persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Biro Pemerintahan,**

Otonomi Daerah dan Kerjasama dan Asisten Pemerintahan menggunakan anggaran senilai Rp710.619.033,00 dari alokasi anggaran Rp711.956.000,00. Sehingga terdapat efisiensi anggaran sebesar Rp1.336.967,00 atau dengan presentase 0,19 persen.

Inovasi

Pada tahun 2025 Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah dan Kerjasama belum menyusun inovasi terbaru tetapi masih terdapat inovasi pada tahun sebelumnya antara lain:



Tentang SEDUNIA

SEDUNIA adalah Sistem pElayanan aDministrasi perjalanan lUar Negeri jAteng yang dikembangkan oleh Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah dan Kerjasama Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah untuk Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah. Masing-masing Kabupaten/Kota hanya diberikan 2 (dua) akun sebagai Pemohon.

SEDUNIA adalah Sistem pElayanan aDministrasi perjalanan lUar Negeri jAteng yang dikembangkan oleh Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah dan Kerjasama Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah untuk Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah. Masing-masing Kabupaten/Kota hanya diberikan 2 (dua) akun sebagai Pemohon. Terdapat 3 (tiga) layanan permohonan pada Aplikasi SEDUNIA yaitu:

- 1 Ijin ke Luar Negeri Bagi Pejabat Negara dan DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota;
- 2 Rekomendasi Perjalanan Dinas Luar Negeri bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dan DPRD Provinsi, Kabupaten/Kota; dan
- 3 Rekomendasi Perjalanan Dinas Luar Negeri bagi ASN Pemerintah Daerah.



Sistem Informasi Kerjasama (SIKEJAM) adalah Sistem Informasi kerjasama berbasis digital yang dibangun oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam rangka mendukung penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Sistem informasi ini dipergunakan untuk mendata, memonitoring dan mengevaluasi kerjasama daerah (kerjasama dalam negeri dan kerjasama luar negeri) di Provinsi Jawa Tengah, Kabupaten Kota atau OPD lainnya. Portal dikelola oleh Bagian Kerja Sama pada Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah dan Kerja Sama Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah yang bertugas memfasilitasi kerjasama berbagai pihak yang berkepentingan melalui layanan digitalisasi, sehingga memudahkan akses dan efisiensi serta efektifitas waktu. Selain itu, tersedia database hasil kerjasama yang dapat dimanfaatkan untuk monitoring dan media publikasi kerjasama yang telah dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sebagai bentuk perwujudan keterbukaan informasi publik yang akuntabel dan transparan dalam mendukung tercapainya Pemerintahan yang baik (*good governance*).



**Laporan
Kinerja
Instansi
Pemerintah
Tahun 2025**

04

Penutup

Kesimpulan

Kinerja Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah dan Kerjasama pada Tahun 2025 menunjukkan capaian yang **“Sangat Tinggi”** dan konsisten dengan tujuan serta sasaran yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Hal ini didukung dengan rata-rata capaian kinerja program mencapai 103,94 persen serta realisasi keuangan sebesar Rp3.630.336.113,00 atau dengan presentase 91,72 persen dan efisiensi anggaran sebesar Rp327.836.887,00 atau dengan presentase 8,28 persen. Seluruh sasaran program berhasil dicapai dengan tingkat capaian kinerja sangat tinggi, mencerminkan efektivitas perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian kinerja organisasi. Pencapaian tersebut didukung oleh peningkatan kualitas fasilitasi dan rekomendasi kebijakan, penguatan koordinasi lintas perangkat daerah, serta pengelolaan anggaran yang efisien dan akuntabel.

Rekomendasi

Untuk mempertahankan dan meningkatkan capaian kinerja Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah dan Kerjasama pada tahun selanjutnya maka perlu dilakukan:

- 1** Meningkatkan kompetensi Sumber Daya Manusia Aparatur dengan Rencana Pengembangan Kompetensi berbasis *Learning Needs Analysis* sebagai dasar penetapan kebutuhan pengembangan kompetensi aparatur yang terarah, terukur, dan selaras dengan tuntutan jabatan serta sasaran kinerja organisasi;
- 2** Mengembangkan aplikasi berbasis web untuk mempermudah dalam mencapai target organisasi;
- 3** Mendorong pemetaan potensi kerjasama daerah sebagai dasar perencanaan dan pelaksanaan kerjasama yang selaras dengan visi misi Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah dan Kerjasama Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah disusun, semoga dapat menjadi bahan pertimbangan/evaluasi untuk kegiatan/kinerja yang akan datang.



**NGOPENI.
NGLAKONI.**
Jateng

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2025

Lampiran



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH

SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Pahlawan No. 9 Telpun 8311174 (20 saluran) Fax. 8311266
Semarang 50243

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : MUHAMAD MASROFI, S.Sos,M.Si
Jabatan : Kepala Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah dan
Kerjasama, Sekretariat Daerah Provinsi Jawa tengah

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : SUMARNO, SE, MM
Jabatan : Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA TENGAH


SUMARNO, SE, MM
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 19700514 199202 1 001

Semarang, 10 Januari 2025
Pihak Pertama,
KEPALA BIRO PEMERINTAHAN,
OTONOMI DAERAH DAN KERJASAMA


MUHAMAD MASROFI, S.Sos,M.Si
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 19680517 198908 1 002

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
BIRO PEMERINTAHAN, OTONOMI DAERAH DAN KERJASAMA
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Kualitas Kerjasama Daerah	1) Tingkat efektivitas kerjasama daerah	95 %
2.	Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Kebijakan Pemerintahan Umum	2) Persentase rekomendasi bidang administrasi pemerintahan, penataan wilayah dan pemerintahan umum yang ditindaklanjuti	95 %
3.	Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Otonomi Daerah	3) Persentase tertib administrasi pelaksanaan otonomi daerah	95 %
4.	Meningkatkan kualitas pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah dan Kerjasama serta Asisten Pemerintahan Kesra	4) Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah dan Kerjasama dan Asisten Pemerintahan	100 %
		5) Indeks Kepuasan Masyarakat Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah dan Kerjasama	82,5
		6) Indeks Manajemen Risiko Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah dan Kerjasama	3

PROGRAM

- 1) Program Pemerintahan dan Otonomi Daerah
- 2) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi

ANGGARAN (Rp)

3.478.000.000
909.526.000

KETERANGAN

APBD
APBD

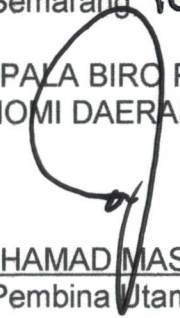
Semarang, 10 Januari 2025

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA TENGAH


SUMARNO, SE, MM

Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 19700514 199202 1 001

KEPALA BIRO PEMERINTAHAN,
OTONOMI DAERAH DAN KERJASAMA


MUHAMAD MASROFI, S.Sos, M.Si

Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 19680517 198908 1 002



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH

SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Pahlawan No. 9 Telpn 8311174 (20 saluran) Fax. 8311266
Semarang 50243

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : YASIP KHASANI, S.IP, MM
Jabatan : Kepala Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah dan
Kerjasama, Sekretariat Daerah Provinsi Jawa tengah

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : SUMARNO, SE, MM
Jabatan : Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA TENGAH


SUMARNO, SE, MM
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 19700514 199202 1 001

Semarang, 1 Oktober 2025
Pihak Pertama,
KEPALA BIRO PEMERINTAHAN,
OTONOMI DAERAH DAN
KERJASAMA


YASIP KHASANI, S.IP, MM
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19741219 199703 1 005

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025
BIRO PEMERINTAHAN, OTONOMI DAERAH DAN KERJASAMA
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Kerjasama Daerah	1) Tingkat efektivitas kerjasama daerah	95 %
2.	Meningkatnya Kualitas Rekomendasi Kebijakan Pemerintahan Umum	2) Persentase rekomendasi bidang administrasi pemerintahan, penataan wilayah dan pemerintahan umum yang ditindaklanjuti	95 %
3.	Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Otonomi Daerah	3) Persentase tertib administrasi pelaksanaan otonomi daerah	95 %
4.	Meningkatkan kualitas pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah dan Kerjasama dan Asisten Pemerintahan Kesra	4) Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Biro Pemerintahan, Otda dan Kerjasama dan Asisten Pemerintahan	100 %
		5) Indeks Kepuasan Masyarakat Biro Pemerintahan, Otda dan Kerjasama	82,5
		6) Indeks Manajemen Risiko Biro Pemerintahan, Otda dan Kerjasama	3

PROGRAM

- 1) Program Pemerintahan dan Otonomi Daerah
- 2) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi

**ANGGARAN
(Rp)**

3.246.217.000
711.956.000

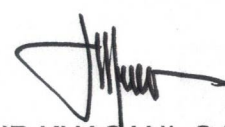
KETERANGAN

APBD
APBD

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA TENGAH


SUMARNO, SE, MM
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 19700514 199202 1 001

Semarang, 1 Oktober 2025
KEPALA BIRO PEMERINTAHAN,
OTONOMI DAERAH DAN KERJASAMA


YASIP KHASANI, S.IP, MM
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19741219 199703 1 005